

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2011

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Disusun Oleh :

NURDIANSYAH
NIM : 10875004514

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2011

OLEH : NURDIANSYAH

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan masalah yang sangat penting pada setiap pemilu dalam rangka pencapaian demokrasi. Penelitian ini dilakukan pada wilayah kecamatan tampan kota Pekanbaru tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru di kecamatan tampan kota Pekanbaru. Penggunaan sampel dalam penelitian ini, penulis menetapkan sampel keseluruhan dari populasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode sensus yaitu keseluruhan populasi yang dianggap mewakili seluruh penduduk kecamatan tampan. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang, dengan rincian masyarakat, tokoh masyarakat tampan. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuisioner, observasi dan interview . sedangkan jenis sumber datanya adalah primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu setelah data terkumpul melalui angket dan observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumusan persentase kemudian dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka dilakukan pengelompokan atas 4 kriteria penelitian yaitu baik, cukup, kurang baik dan tidak baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dengan indikator ekonomi, pendidikan, sosial, dan kepribadian individu dalam masyarakat yang masih rendah pada kecamatan tampan kota Pekanbaru sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemilu wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Dalam hal ini penulis menyarankan masyarakat agar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kecamatan tampan kota Pekanbaru agar sudi dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu kota Pekanbaru khususnya di kecamatan tampan, dan menghilangkan anggapan mereka yang salah, yang beranggapan tidak ada untung dan ruginya untuk berpartisipasi.

Keyword : *Partisipasi Masyarakat, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kepribadian individu dalam masyarakat*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II : KERANGKA TEORI	
2.1. Pengertian Partisipasi Politik	8
2.2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	12
2.3. Masyarakat	17
2.4. Pemilihan Umum.....	19
2.5. Defenisi Konsep	21
2.6. Konsep Operasional	22
2.7. Hipotesis.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	28
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3. Populasi dan Sample	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	29

3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Analisa data	30
BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan...	31
4.2. Struktur Organisasi Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.....	43
4.3. Uraian Tugas Pegawai Kantor Camat Tampan kota Pekanbaru.	43
4.4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	46
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Identitas Responden Secara Umum.....	57
5.2. Analisis Partisipasi Masyarakat	59
5.3. Analisis Ekonomi	65
5.4. Analisis Pendidikan.....	71
5.5. Analisis Sosial	75
5.6. Analisis Kepribadian Individu Dalam Masyarakat	79
BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	85
6.2. Saran.....	86

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang (PSU) Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Pada Kecamatan Tampan Tahun 2011.	4
Tabel I.2 : Partisipasi Masyarakat Pada Hasil Pemilihan Pemilukada Kota Pekanbaru 2011-2015 Di Kecamatan Tampan Pada Putaran I	5
Tabel I.3 : Partisipasi Masyarakat Pada Hasil Pemilihan Pemilukada Kota Pekanbaru 2011-2015 di Kecamatan Tampan Pada Putaran II.....	6
Tabel IV.1 : Mata Pencarian Kecamatan Tampan Pada Umumnya.....	41
Tabel IV.2. : Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel IV.3 : Sarana Ibadah Kecamatan Tampan	42
Tabel IV.4 : Sarana Kesehatan.....	42
Tabel V.1 : Usia Responden.....	58
Tabel V.2 : Masa kerja responden.....	58
Tabel V.3 : Jenis Kelamin Responden	59
Tabel V.4 : Tingkat Pendidikan Responden	59
Tabel V.5 : Tanggapan responden terhadap ikut serta dalam memberikan hak suara pada Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Tahun 2011.	61
Tabel V.6 : Tanggapan responden terhadap menyumbangkan pemikiran yang terbaik dalam pembentukan panitia Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Kecamatan Tahun 2011.....	62
Tabel V.7 : Tanggapan responden terhadap memberikan hak pilih apabila mendapat imbalan yang sesuai dengan keinginan.	63

Tabel V.8 : Tanggapan responden terhadap memberikan hak pilih sesuai hati nurani dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Tahun 2011	64
Tabel V.9 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat Pemilukada Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Tahun 2011.	64
Tabel V.10 : Tanggapan responden terhadap mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.	66
Tabel V.11 : Tanggapan responden terhadap mengajak sesama masyarakat ikut mendaftar dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.	67
Tabel V.12 : Tanggapan responden terhadap sikap tidak peduli terhadap informasi tentang pendaftaran pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	68
Tabel V.13 : Tanggapan responden terhadap sikap masa bodoh meskipun tidak mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	69
Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap faktor ekonomi ...	70
Tabel V.15 : Tanggapan responden terhadap hanya mementingkan diri sendiri dalam pendaftaran Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.....	71
Tabel V.16 : Tanggapan responden terhadap kehadiran dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	72
Tabel V.17 : Tanggapan responden terhadap kesediaan meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru	73
Tabel V.18 : Tanggapan responden senantiasa mencari informasi yang berkaitan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	74
Tabel V.19 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap faktor pendidikan....	74

Tabel V.20 : Tanggapan responden terhadap tidak peduli terhadap pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	75
Tabel V.21 : Tanggapan responden terhadap merasa jenuh untuk mendengarkan berbagai hal yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	76
Tabel V.22 : Tanggapan responden terhadap merasa tidak perlu mencari informasi yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	77
Tabel V.23 : Tanggapan responden terhadap kehadiran dan turut serta untuk memberikan hak suara dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	77
Tabel V.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap faktor sosial	78
Tabel V.25 : Tanggapan Responden Tentang bersikap tidak mau tau terhadap janji-janji politik pada kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.	79
Tabel V.26 : Tanggapan Responden senantiasa mencari informasi tentang kapan diselenggarakannya Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	80
Tabel V.27 : Tanggapan Responden Terhadap cenderung absten dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	81
Tabel V.28 : Tanggapan Responden Tentang berperan aktif dalam proses penghitungan suara hasil Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru	82
Tabel V.29 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Kepribadian Individu Dalam Masyarakat	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Diera modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun sosial yang menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalannya. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang berlaku baik dari norma adat, budaya, agama, maupun hukum.

Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecendrungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidakpedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti Pemilukada Kota Pekanbaru.

Pemilukada adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat di nanti - nanti oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya kota Pekanbaru. Pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah dari hati nurani masyarakat kota Pekanbaru. Pemilukada Kota Pekanbaru tersebut dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang akan duduk di Pemerintahan kota Pekanbaru untuk melaksanakan amanah masyarakat yang memilihnya dalam mengatasi permasalahan - permasalahan yang

timbul baik cakupan Indonesia secara umum maupun daerah seperti Provinsi/Kota.

Maka salah satu perubahan yang sangat mendasar menyangkut reformasi dalam bidang hukum ketatanegaraan khususnya pemerintahan daerah adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten akan dilaksanakan secara langsung. Dalam hal ini rakyat yang memilih kepala daerah yaitu wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Berbeda pada saat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ketika masih dinyatakan masih berlaku atau undang-undang pemerintah daerah yang pernah dinyatakan berlaku sebelum lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pada saat itu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Kemudian pemilukada Kota Pekanbaru ini merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam menentukan sosok seorang pemimpin yang sesuai kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan akan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbagai kebijakan akan diambil oleh Pemerintah kota Pekanbaru untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan serta tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan peranan partisipasi masyarakat sangat penting. Karena partisipasi masyarakat sangat menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan diharapkan dapat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat.

Lijan Poltak Sinambela (2006: 37) menyatakan bahwa partisipasi ditinjau dari etimologis merupakan *participation* (bahasa Inggris), yang berarti bagian atau ikut serta. Partisipasi adalah bagian keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu menyumbang tenaga, pikiran, maupun uang. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam suatu lingkungan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kota Pekanbaru yang diharapkan adalah mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar sanggup memperjuangkan keinginan masyarakat dan mampu mewujudkan suatu perubahan dan memberikan pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat merasa dilindungi serta benar-benar memikirkan kehidupan masyarakatnya.

Lebih lanjut Lijan Poltak Sinambela (2006 : 37), juga mengatakan tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Dimana keputusan publik diambil akan memberikan kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Artinya, partisipasi merupakan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pemilihan wali kota Pekanbaru nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu motivasi memberikan motif atau hal yang menyangkut dorongan seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu yang sangat diperlukan.

Partisipasi masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Disamping itu juga diharapkan agar proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan suatu legitimasi bagi sistem politik.

Pemilukada Kota Pekanbaru adalah pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 banyak mengalami perubahan dari mulai pelaksanaan tata cara pemilihan sampai pada penentuan calon dengan suara terbanyak. Sehingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan jumlah daftar pemilih tetap pada kecamatan Tampan :

Tabel I.1 : DAFTAR PEMILIH TETAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU PADA KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2011.

No	KECAMATAN TAMPAN	DAFTAR PEMILIH TETAP			JUMLAH YANG MEMILIH	JLH TPS
		LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	TOTAL		
1	Kel. Simpang Baru	8.321	7.694	16.015	15.956	39
2	Kel. Sidomulyo Barat	11.185	10.847	22.032	21.990	49
3	Kel. Buah Karya	12.997	12.066	25.063	25.055	56
4	Kel. Delima	8.612	8.346	16.958	16.950	40
Jumlah		41.115	38.953	80.068	79.951	184

Sumber : KPUD Pekanbaru 2011

Dari penjelasan tabel diatas bahwa Daftar Pemilih Tetap pada Kecamatan Tampan kota Pekanbaru di 4 kelurahan di Kecamatan Tampan yakni kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, kelurahan Buah Karya, kelurahan Delima dengan keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 80.068 orang

dan total yang ikut memilih sebanyak 79.951 Orang, maka yang tidak memilih sebanyak 117 orang. Maka dapat disimpulkan pada Daftar Pemilih Tetap pelaksanaan pemilukada kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan dengan melihat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dengan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan kepribadian individu dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang belum mengetahui dengan baik tentang tata cara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tersebut. Makanya mereka sedikit enggan untuk berpartisipasi dalam Pemilukada saat ini. Disamping itu masih adanya masyarakat yang tidak terdata sebagai pemilih tetap hal ini dapat dilihat pada tabel I.1

Tabel I.2 : Partisipasi Masyarakat Pada Hasil Pemilihan Pemilukada Kota Pekanbaru 2011-2015 Di Kecamatan Tampan Pada Putaran I

No	Kecamatan	Pasangan Firdaus-Ayat	Pasangan Septina-Erizar	Jumlah suara sah	Jumlah Suara tidak sah	Jumlah suara sah dan tidak sah
1	Tampan	46.774	32.774	79.548	520	80.068
Jumlah		46.774 Orang	32.774 Orang	79.548 Orang	520 Orang	80.068 Orang

Sumber : KPUD Kota Pekanbaru 2011

Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendataan pemilih tetap dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tidak akurat. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat kurang dalam mengikuti Pemilukada Kota Pekanbaru 2011.

Padahal masyarakat mengetahui betapa pentingnya sosok seorang pemimpin yang akan melakukan perubahan yang lebih baik demi pengembangan pembangunan di daerah mereka. Persoalan ini sangat penting pada saat sebuah komitmen terpenting menuju masa depan dan masyarakat mengabaikan detik-detik yang dapat membawa perubahan. Ini terbukti pada kenyataannya 520 suara tidak sah.

Sedangkan pada pemilihan suara ulang yaitu jauh sangat berbeda, artinya perubahan ini sangat menjadi tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat dan upaya instansi terkait dalam sosialisasi maupun pendataan ulang. Kemudian dapat diperjelas pada tabel 1.2 :

Tabel I.3 : Partisipasi Masyarakat Pada Hasil Pemilihan Pemilukada Kota Pekanbaru 2011-2015 Di Kecamatan Tampan Pada Putaran II

No	Kecamatan	Pasangan Firdaus-Ayat	Pasangan Septina-Erizal	Jumlah suara sah	Jumlah Suara tidak sah	Jumlah suara sah dan tidak sah
1	Tampan	43.165	36.690	79.855	213	80.068
Jumlah		43.165 Orang	36.690 Orang	79.855 Orang	213 Orang	80.068 Orang

Sumber : KPUD Kota Pekanbaru 2011

Kemudian dari penjelasan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan hasil pemilihan suara ulang tingkat partisipasi masyarakat lebih meningkat pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, karena pemerintah kecamatan lebih meningkatkan data-data masyarakat dari daftar sebelumnya sebagai daftar pemilih tetap dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 80.068 orang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Tampan Tahun 2011”**.

1.2. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan Wali kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

- a. Secara teoritis, membangun dan mengembangkan khasanah keilmuan.
- b. Memberikan sumbangan kajian yang mendalam tentang partisipasi masyarakat.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Saligman dan Edwin (dalam Muhammad Al-Amin, 2003 : 9), partisipasi yaitu ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Ramlan Subakti (1999: 140) mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan warga negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.

Lijan Poltak Sinambela (2006 : 37), pemahaman konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh dikemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering pula berpengaruh bagi lingkungannya.

Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

kebijaksanaan pemerintah. Partispasi politik menurut Meriam Budiarjo bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida, ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu dibuktikan dirinya unggul dari pada orang lain. Atau dengan perkataan lain struktur piramida kekuasaan terbentuk dalam sejarah masyarakat.(Budiarjo, 2004: 36).

Herbert (dalam Budiarjo, 1998:2) mendefenisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Huntington memandang partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.(Arifin, 2003:131)

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana dari defenisi tersebut Hungton menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan rill bukan pernyataan sikap, selanjutnya partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan politik bagi pengikutnya (James Rosenau dan Nimmo, 2000:126)

Ragamaran mengatakan partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politikpun

berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat berjalan. (Ragamaran, 2002:147).

Lijan poltak sinambela (2006 : 37), Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya.

Dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat sangat memerlukan motivasi sehingga mau berbuat sesuatu yang telah direncanakan baik secara sendiri maupun dengan orang lain. Seseorang mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan kota Pekanbaru disebabkan adanya motivasi dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu menjadi panutan dalam kehidupan mereka dan merubah kehidupan menjadi lebih baik.

Kartini kartono (2005 : 101), mengemukakan bahwa motivasi adalah sebab, alasan dasar, gambaran, dorongan bagi seseorang untuk berbuat ide pokok yang berpengaruh sekali terhadap segenap tingkah lakuk manusia. Seseorang akan berpartisipasi karena adanya motivasi sehingga mereka mau memilih seorang pemimpin pemerintah kota Pekanbaru, mungkin karna ada sesuatu yang diberikan kepadanya.

Milbarth menyebutkan empat faktor utama utama yang mendorong orang untuk berparsipasi dalam kehidupan politik :

1. Karena adanya dorongan, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik.

2. Karena faktor karakteristik seseorang, orang-orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.
3. Faktor karakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Morris Rosenberg (Sri Erlanda, 2005: 54), mengemukakan ada tiga alasan mengapa orang malas berpartisipasi dalam kehidupan politik :

1. Karena ketakutan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan bahwa politik ancaman dalam kehidupan.
2. Karena beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan, dan beranggapan bahwa berpartisipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya.
3. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut (Merphin panjaitan, 2000:8) mengatakan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar demokrasi negara tersebut.

Demokrasi berasal dari bahas Yunani yaitu dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintahan, dengan demikian berarti pemerintahan rakyat. Sebagai mana diungkapkan Giddes (dalam Ghofur, 2002:15) bahwa demokrasi pada dasarnya mengandung makna sisitem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan.

Dalam suatu Negara demokrasi, sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sebagai tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya. Semangkin banyak warga negara yang berpartisipasi menunjukkan bahwa semangkin berhasilnya sistem politik negara tersebut. Tetapi kalau partisipasi politik warga negara rendah maka dapat dikatakan sistem politikya kurang baik.

Dari beberapa pendapat pakar diatas yang mengungkapkan defenisi partisipasi, dapat dipahami bahwa parsipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam pemelihan dan pengambilan keputusan kemudian terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Huntington mengemukakan bahwa partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain:

1. Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye.
2. Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya. (Arifin, 2003:140)

Sejalan dengan Huntington, Almond (dalam Mas'oeed dan Adrews, 1997:48) juga mengemukakan ada dua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat yakni partisipasi politik konvensional yang meliputi: pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik manusia serta perang dan gerilya.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005 : 135-138), partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Partisipasi dalam pemilihan
2. Partisipasi kelompok
3. Kontak antara warga negara dengan pemerintah atau sosialisasi
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah

lebih lanjut Huntington menyatakan ada dua sifat partisipasi politik yakni partisipasi otonom dan partisipasi yang mobilisasi. Partisipasi politik yang otonom maksudnya adalah partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya sendiri. Sedangkan partisipasi yang mobilisasi adalah partisipasi yang diberikan atas dasar rangsangan atau tindak atas instruksi dan sebagian besar digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat atau rasa takut terhadap seorang pemimpin (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990:173).

Partisipasi yang otonom ini biasanya terdapat dalam masyarakat yang maju sedangkan dinegara berkembang yang masyarakatnya belum begitu maju sering kita jumpai partisipasi yang sifatnya mobilisasi.

Kemudian menurut Pasaribu, Simanjuntak (1992 : 4) mengemukakan pendapat bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat perlu adanya:

1. Mengklasifikasikan jenis partisipasi yaitu semacam sumbangan yang di berikan kelompok yang berpartisipasi. Sumbangan dalam berpartisipasi berjenis-jenis seperti:
 - a. Partisipasi buah pikiran yang diberikan dalam rapat.
 - b. Partisipasi tenaga yang diberikan dalam pembangunan atau perbaikan pembangunan.
 - c. Partisipasi harta benda dan uang yang diberikan dalam menolong aneka ragam industri.
 - d. Partisipasi sosial yang diberikan sebagai tanda kedekatan.
2. Mewadahi partisipasi
Partisipasi masyarakat ini perlu diwadahi agar kegairahan partisipasi tidak melayang
3. Menciptakan prasarat partisipasi yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sosial seperti rasa senasib sepenanggungan, keterlibatan tujuan hidup kemampuan menyesuaikan, adanya prakarsa iklim partisipasi.

Kemudian faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat (Desseldorp, 1994:16) :

1. Faktor Ekonomi.

Kondisi ekonomi meliputi :

- a. Tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Pemberian bantuan berupa uang.

c. Jumlah keluarga.

2. Faktor Sosial dan pendidikan

Kondisi sosial meliputi :

a. Partisipasi masyarakat.

b. Kemampuan beradaptasi

c. Tingkat pendidikan.

3. Faktor Politik.

Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir.

Faktor politik meliputi :

a. Komunikasi Politik.

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara actual maupun secara potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

b. Kesadaran Politik.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat memiliki perhatian terhadap masalah kenegaraan ataupun pembangunan.

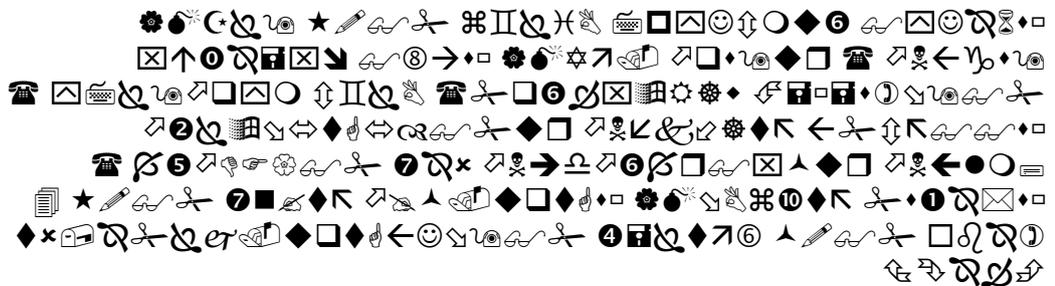
c. Pengetahuan dan kepribadian individu Masyarakat Terhadap Proses Pengambilan Keputusan.

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

d. Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik.

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan public dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

Kemudian dalam Al-Qur'an juga dijelaskan agar kita selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat menyamakan perbedaan pendapat, sebagaimana terdapat dalam Surat Ali 'Imran Ayat 159 sebagai berikut:



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Ali'Imran :159).

Selain ayat diatas dalam Al-Qur'an juga menjelaskan agar kita taat kepada Allah, Rasulullah, dan Ulil amri, serta kita berlainan pendapat hendaknya kita kembalikan kepada Allah, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah.

Dengan musyawarah segala keputusan publik yang diambil akan memberikan kepuasan dan dukungan masyarakat yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang dapat memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi akan menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan dan memperoleh nilai-nilai dari suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai unsur terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan mampu dan dapat ikut serta dalam penentuan suatu kebijakan yang berpengaruh bagi kesejahteraan hidupnya maupun lingkungan sekitarnya.

2.3. Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Ralf Linton dalam Abdul syani, 2002 :31) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat

mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut :

1. Bercampur untuk waktu yang lama.
2. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan.
3. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dengan yang lain saling ketergantungan. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita selalu memerlukan orang lain, karena kita tahu bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Menurut Harold J. Laski (dalam Meriam Budiarjo, 2004: 34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya.

Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, agar terjaga dan terpelihara dari ancaman-ancaman yang merusak kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan (hukum), manusia akan merasa takut untuk mengganggu dan berbuat jahat kepada orang lain.

Harold Lasswell (dalam Meriam Bidiarjo, 2004 : 33), mengamati kehidupan masyarakat disekelilingnya, yaitu masyarakat barat ia memperinci delapan nilai yang diinginkan yaitu :

1. Kekuasaan
2. Pendidikan
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Keterampilan
6. Kasih sayang
7. Kejujuran
8. Kesegaran

Mariam Budiarto (2000 : 32), dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus dalam kehidupan masyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain, pada dasarnya setiap manusia pasti menginginkan nilai-nilai diatas, karena nilai-nilai diatas merupakan suatu kebutuhan yang ingin diwujudkan dan menjadikan impian bagi setiap orang.

2.4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan yang dilaksanakan ini adalah untuk memilih pemimpin Rakyat, yaitu kepala daerah kota Pekanbaru.

Sedangkan yang boleh memilih dalam Pemilukada adalah Warga Negara Indonesia di kota Pekanbaru yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. (UU No. 10 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat 22). Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilukada meliputi:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran peserta pemilukada;
- c. Penetapan peserta pemilukada;
- d. Pencalonan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru Masa kampanye;
- e. Masa tenang;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Penetapan hasil pemilukada; dan
- h. Pengucapan sumpah/janji wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru.

2.5. Defenisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep

yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah:

1. Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
2. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
3. Demokrasi adalah mengandung makna sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan.
4. Motivasi adalah sebab, alasan dasar, gambaran, dorongan bagi seseorang untuk berbuat ide pokok yang berpengaruh sekali terhadap segenap tingkah laku manusia untuk memilih seorang pemimpin.
5. Bentuk-bentuk partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan mulai dari pendataan pemilih, diskusi publik, kampanye, pemilihan, dan lain-lain.
6. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu.
7. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada provinsi Riau untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru.

2.6. Konsep Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman beberapa konsep yang digunakan penelitian ini akan dioperasionalkan lebih lanjut secara melalui metode sebagai berikut :

1. Partisipasi

Yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan: dalam pelaksanaan pemilukada kota pekanbaru pada kecamatan tampan yang diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pembentukan panitia pelaksana pemilukada Kota Pekanbaru dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan panitia pencalonan wali kota dan wakil wali kota yang dimaksud dengan ini adalah adanya sejumlah orang yang ikut dan terlibat di dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan pencalonan kepala daerah berdasarkan peraturan yang ada.
- b. Partisipasi dalam pendaftaran pemilihan yaitu partisipasi masyarakat dalam pendaftaran pemilihan disini adalah adanya sejumlah orang yang ikut terlibat langsung dalam pendaftaran pemilukada berdasarkan

peraturan yang ada yang telah disepakati.

- c. Partisipasi dalam kampanye pemilukada kota Pekanbaru yaitu partisipasi masyarakat dalam kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru disini adalah adanya sejumlah masyarakat yang ikut baik menjadi tim sukses maupun yang menjadi pendengar. maupun membicarakan dari masing-masing calon.
- d. Partisipasi dalam pemungutan suara adalah partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara disini adalah adanya sejumlah orang yang ikut memberikan suaranya saat pemilihan.
- e. Partisipasi dalam penghitungan suara yaitu partisipasi masyarakat dalam penghitungan suara adalah adanya sejumlah orang yang ikut dan terjun langsung dalam proses penghitungan suara. seperti menjadi panitia. saksi. ataupun melakukan tugas lain demi memperlancar jalannya proses penghitungan suara.

Pemahaman konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan dan keputusan.

Pengukuranya :

Baik : Apabila ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Cukup Baik : Apabila keikutsertaan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Kurang baik : Apabila masyarakat tidak peduli dalam menentukan hak suara yang telah diberikan.

2. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk melakukan aktivitas termasuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pemilukada kota Pekanbaru, maka demi terwujudnya demokrasi yang bersih tentunya partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Namun disamping dalam memenuhi kebutuhan hidup juga penting, sehingga untuk berpartisipasi dalam pemilukada kota Pekanbaru juga berpengaruh, karena sebagian masyarakat menganggap hanya buang-buang waktu saja

Pengukuranya :

Baik : Apabila kondisi ekonomi masyarakat bagus, maka tingkat partisipasi juga akan bagus.

Cukup Baik : Apabila keikutsertaan dalam menentukan hak pilih sehingga masyarakat berperan aktif dalam proses pelaksanaan pemilukada kota Pekanbaru.

Kurang baik : Apabila masyarakat tidak peduli dalam menentukan hak suara yang telah diberikan dengan alasan kondisi ekonomi.

3. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan factor utama dalam menilai pemimpin yang berkualitas, karena semakin tinggi mutu pendidikan masyarakat maka semakin bagus pula dalam menentukan pilihan masyarakat itu terhadap pemimpinnya. Artinya dengan pemimpin yang berkualitas tentu mampu untuk memecahkan permasalahan yang kongkrit dengan cepat sesuai tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin.

Pengukurannya :

Baik : Apabila pendidikan masyarakat memiliki kualitas yang bagus, maka dalam menentukan pemimpin juga bagus pula hasilnya dari calon-calon yang ada.

Cukup Baik : Apabila semakin tinggi pendidikan masyarakat, tentunya masyarakat udah bisa memahami calon-calon pemimpin yang terbaik.

Kurang baik : Apabila pendidikan masyarakat rendah tentunya merasa bingung dan mudah dipengaruhi

4. Faktor sosial

Masalah sosial merupakan kondisi kehidupan ditengah-tengah masyarakat yang semakin komplek dengan tekanan sistem politik pada suatu daerah, khususnya di kota pekanbaru karena sarana kedaulatan rakyat dalam rangka

memilih sepasang pemimpin guna membentuk pemerintahan di daerah untuk satu periode kepemimpinan pemerintahan lima tahun berikutnya.

Pengukurannya :

Baik : Apabila kondisi sosial masyarakat terjalin dengan baik, sehingga dapat terjalin sosialisasi kebersamaan antar sesama dan dapat membangun persaingan secara sehat.

Cukup Baik : Apabila masyarakat peduli berinteraksi antar sesama. Maka tentunya dapat mengendalikan dan menyatukan dari berbagai keberagaman

Kurang baik : Apabila sosial masyarakat rendah ini akan berdampak perpecahan antar sesama akibat pro dan kontra.

5. Faktor Kepribadian Individu Dalam Masyarakat

Kepribadian individu dalam masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan suatu pilihan menurut hati nurani agar pemimpin itu bisa menjadi suatu harapan masa depan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka sosok seorang pemimpin yang idaman masyarakat adalah pemimpin yang betul-betul amanah terhadap janji dan merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Sehingga kelompok masyarakat dengan memiliki budaya dan karakter yang berbeda juga berpengaruh terhadap proses sosialisasi di lingkungan pada kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang dilakukan oleh para petugas sensus dalam menentukan daftar pemilih tetap.

Pengukurannya :

Baik : Apabila setiap individu masyarakat sadar dan merasa tanggung jawab, maka tentunya tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi.

Cukup Baik : Apabila setiap individu masyarakat cukup peduli terhadap hak suara yang diberikan, maka tentunya tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi pula.

Kurang baik : Apabila setiap individu masyarakat tidak peduli terhadap hak suara yang diberikan, maka tentunya tingkat partisipasi masyarakat semakin menurun.

2.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :
Diduga bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tampan dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru 2011 masih rendah dikarenakan oleh beberapa faktor :

1. Ekonomi
2. Pendidikan
3. Sosial
4. Kepribadian individu dalam masyarakat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. (Sugiono, 2005 : 11)

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Tampan kota Pekanbaru terhitung mulai tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 28 Februari 2012.

3.3. Populasi dan Sample

Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagian tokoh masyarakat yang mempunyai hak pilih dan pegawai di instansi terkait sebagai keterwakilan masyarakat di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang berjumlah 100 orang. Karena jumlah populasi sedikit maka penulis memutuskan menggunakan seluruhnya dijadikan sample dengan metode penelitian purposive sampling. (Sugiono. 2002.62).

Kemudian dapat dilihat lebih jelas dengan rincian pada teknik dalam menentukan sample diatas yaitu dari keterwakilan jumlah populasi adalah pegawai Kantor Camat Tampan sebanyak 10 orang (10%), pegawai Kelurahan sebanyak 20 orang (20%), Tokoh Masyarakat sebanyak 30 orang (30%), Tokoh agama sebanyak 10 orang (10%), masyarakat umum sebanyak 30 orang (30%). Jadi jumlah keseluruhan adalah sebanyak 100 orang (100%).

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Suryabrata, 2003 : 39)
2. Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh.
2. Quisioner yaitu peneliti mengajukan daftar pertanyaan kepada responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3.6. Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui angket dan observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase (Anas Sudjono:2004), yaitu sebagai berikut :

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka dilakukan pengelompokan atas 4 kriteria penilaian yaitu baik, cukup, kurang baik dan tidak baik, Adapun kriteria persentase tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) 76% - 100% tergolong baik
- 2) 56% – 75% tergolong cukup baik
- 3) 40% – 55% tergolong kurang baik
- 4) 40% kebawah tergolong tidak baik”. (Suharsimi Arikunto: 2002)

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai Lading, lambat laut menjadi perkampungan. kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian di sebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.

Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar mesjid raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatip untuk membuat pekan di senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh Putranya Raja muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 21 Rajab 1204 H atau Tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, lima puluh, tanah datar dan Kampar), Negri Senapelan diganti nama nya menjadi “*Pekan Baharu*” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulia saat itu senapelan sudah ditingalkan dan mulia populer sebutan “*Pekan Baharu*”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*Pekanbaru*”.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit Van Her Inlanche Zelf bestuur Van Siak No.1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut *district*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer di sebut *gokung*, distri menjadi gun di pekepalai oleh *gunco*.
4. Ketetapan Gubernur di Sumatra di Medan Tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang di sebut *haminte* atau kota baru.
5. Undang-undang No.22 Tahun1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, kota Pekanbaru di beri status Kota Kecil.
6. Undang-undang No.8 tahun 1956 menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. Undang-undang No.1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi kota praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. Undang-undang No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebagai Kotamadya.

10. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan kotamadya berubah majadi kota.

a. Letak dan luas

Kota Pekanbaru terletak antra $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ bujur timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan perturan pemerintah No. 19 tahun 1987 Tanggal 7 September pertaturan pemerintan no 19 tahun 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $+ 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembagnunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibetuklah Kecamatan baru dengan perda kota Pekanbaru NO.4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

b. Batasan wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota ;

1. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan
3. Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah barat ; Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungan antara lain : Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ – $43,0^{\circ}\text{C}$ dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.

2. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. Kelembapan maksimum antara 96% - 100% Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

e. Jarak Ibukota

kota Pekanbaru merupakan Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota provinsi lainnya sebagai berikut :

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21,3,5 Km
	Kerinci	= 33,3 Km
	Siak	= 74,4
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir pengarian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128,5 Km
	Bagan	= 192,5
	Dumai	= 125 Km

f. Visi misi

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah “terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”.

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Pusat perdagangan dan jasa, menggambarkan keadaan masyarakat kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan pemerintah kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya di names akan selalu

berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.

2. Pusat pendidikan, pemerintahan kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.
3. Pusat kebudayaan melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya melayu. Kehendak menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu antara lain akan arahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat melayu serta makin mantapnya kehidupan dapat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

4. Masyarakat sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relative aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.
5. Berladaskan iman dan taqwa merupakan landasa spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan prilaku individu pembinaan agama bersama-sama tercermin dalam kehidupan yang harmoni, seimbang dan selaras.

Kota Pekanbaru yang dikawal dengan slogan “KOTAKU, kotamu dan kota kita BERTUAH”, mempunyai motto : BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN, dan HARMONIS dan arti :

g. BERSIH

Bersih lahir, jiwa, rumah tangga lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

h. TERTIB

Tertibe pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, peribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

i. Usaha BERSAMA

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, parpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cendekiawan seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunana untuk kesejahteraan rakyat.

j. AMAN

Rasa tentram setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

k. HARMONIS

Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggunagan, saling hormat menghormati.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Sehingga pada saat ini luas wilayah Kecamatan Tampan adalah \pm 65 KM² yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya

3. Kelurahan Sidomulyo Barat

4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah lain sangat cocok dipergunakan untuk pertanian.

4.1.1. Administrasi Pemerintahan

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Wilayah Kecamatan sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 4 Kelurahan, 43 RW dan 210 RT.

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan telah dibuka loket pelayanan di Kantor Kecamatan. Pada loket pelayanan tersebut secara transparan ditetapkan proses, mekanisme, waktu, tarif dan dasar hukum pemberian pelayanan.

Jumlah aparat pemerintahan di Kecamatan Tampan adalah 50 orang, 22 orang diantaranya berada di sekretariat Kecamatan.

4.1.2. Mata Pencaharian Penduduk di Wilayah Kecamatan Tampan

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Tampan pada umumnya adalah wiraswasta/pedagang, pegawai negeri, buruh, dan pengrajin/industri kecil.

Tabel IV.1 : Mata Pencarian Kecamatan Tampan Pada Umumnya.

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (orang)
1.	Pengusaha sedang/besar	134
2.	Pengrajin/ industri kecil	939
3.	Buruh Industri	1.274
4.	Buruh Bangunan	1.683
5.	Pedagang	2.473
6.	PNS	2.731
7.	TNI/POLRI	673

Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci bahwa mata pencarian setiap individu dan kelompok pada umumnya mereka adalah sebagai pedagang yaitu 2.473 orang.

4.1.3. Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum

a. Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan menurut tingkatan pendidikan di Kecamatan Tampan:

Tabel IV.2. : Tingkat Pendidikan

No	KELURAHAN	TINGKATAN PENDIDIKAN					
		TK	SD	SLTP	SLTA	AKADEMIK	PT
1.	Simpang Baru	4	4	1	1	-	2
2.	Tuah Karya	4	5	-	1	1	-
3.	Sidomulyo Barat	4	3	1	1	1	-
4.	Delima	4	4	1	-	-	-
	Jumlah	16	16	3	3	2	2

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di kecamatan Tampan sudah mewakili dari tingkat terendah sampai ke perguruan tinggi.

b. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Wilayah Kecamatan Tampan pada mayoritasnya adalah muslim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Sarana Ibadah Kecamatan Tampan

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	68
2.	Mushallah	47
3.	Gereja	5
	Jumlah	120

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang paling banyak adalah masjid yaitu sebanyak 68 bangunan, karena kecamatan Tampan pada mayoritasnya adalah masyarakat muslim.

c. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Wilayah Kecamatan Tampan pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Sarana Kesehatan.

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	1
2.	Puskesmas dan Puskemas Pembantu	4
3.	Balai Pengobatan	8
	Jumlah	13

Dari tabel diatas dapat diperjelas bahwa sarana kesehatan merupakan sangat penting pada setiap wilayah. Maka sebanyak 13 sarana kesehatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan masyarakat untuk wilayah kecamatan.

4.2. Struktur Organisasi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Pada lampiran)

4.3. Uraian Tugas Pegawai Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 6 Tahun 2001

Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 66 ayat 4 menyebutkan bahwa Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dan selanjutnya pada Pasal 67 ayat 4 disebutkan bahwa Lurah menerima pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Camat.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut maka Walikota Pekanbaru telah menyerahkan sebagian kewenangan tersebut kepada Camat untuk menjalankan fungsi pelayanan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang meliputi :

1. Surat Keputusan Walikota Nomor: 112 Tahun 2002 Tanggal 1 Juli 2002 Tentang Pelimpahan kewenangan kepada Camat.
2. Surat Walikota No: 065/377-ORG/2003 Tanggal 17 April 2003 Tentang Pelayanan Terpadu.
3. Keputusan Walikota No: 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebersihan.

Kemudian kewenangan yang diterima Camat tersebut sebagian telah di serahkan pula kepada Lurah berdasarkan Surat Keputusan Camat Tampan Nomor 292 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat Kepada Lurah.

Kemudian untuk lebih jelas lagi terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Tampan yaitu sebagai berikut :

4.3.1. Fungsi Pelayanan

Didalam melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada Camat di Kecamatan Tampan telah dilaksanakan fungsi pelayanan terpadu yang mengacu pada Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI PELAYANAN :

“Terwujudnya Pelayanan Yang Baik dan Menyenangkan.”

MISI PELAYANAN

1. Pelayanan yang ramah dan simpatik.
2. Pelayanan yang cepat dan tepat.
3. Pelayanan yang transparan dan efisien.
4. Pelayanan yang memiliki kepastian hukum.

Beberapa jenis pelayanan yang dilayani adalah sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Berdomisili.
4. Surat pindah.
5. Surat Keterangan Berdomisili Usaha.
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
7. PPAT
8. Surat Keterangan Tidak Mampu.
9. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Legalisir
11. Surat Masuk dan keluar, naskah dinas dan cap

Semua jenis pelayanan diatas dilaksanakan dalam loket unit pelayanan terpadu. Kemudian fungsi pelayanan lainnya yang dilaksanakan di Kecamatan Tampan adalah penanganan kebersihan dimana dalam pelaksanaan penanganan ini di Kecamatan Tampan telah dibentuk Satgas K-3. Sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas-tugas Satgas K-3, telah diatur melalui Keputusan Camat Tampan No : 36/KT/I/2004 Tentang Panduan Penanganan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kecamatan Tampan yang diberi nama Rentak K-3 di Kecamatan Tampan.

Dimana Satgas K3 ini melakukan pengangkutan sampah di sepanjang jalan-jalan protocol dan perumahan pemukiman penduduk. Saat ini Kecamatan

Tampam memiliki 3 armada pengangkutan sampah dengan 26 Petugas Operasional.

4.4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, dimana wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Secara prinsip terdapat 4 (empat) tugas pokok KPU dalam menyelenggarakan setiap Pemilu adalah: merencanakan, melaksanakan, mensosialisasikan dan mengevaluasi.

Untuk memastikan terselenggaranya Pemilu berdasarkan asas Pemilu yang demokratis, maka diperlukan prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara Pemilu, yang dirumuskan dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008. Pada, prinsip kode etik tersebut menetap, antara, lain: (1) Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; (2) Bersikap dan bertindak non-partisan dan imparial; (3) Bertindak transparan dan akuntabel; (4) Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; (5) Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; (6) Bertindak profesional; dan (7) Administrasi Pemilu yang akurat.

Untuk menyebarluaskan informasi tentang penyelenggara Pemilu, selanjutnya diuraikan tentang tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

A. Tugas dan Wewenang KPUD Kota Pekanbaru

- 1) Merencanakan program anggaran dan jadwal Pemilu Kada.
- 2) Menyusun dan menetapkan taksis kerja KPU dalam Pemilu Kada dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Riau.
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kada.
- 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Riau.
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Kota Pekanbaru.
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi Riau dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Riau
- 9) Menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang telah memenuhi persyaratan.
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kada, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari

seluruh PPK di wilayah Kota Pekanbaru dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- 11) Membuat berita acara, penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada, saksi peserta Pemilu Kada.
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kota Pekanbaru untuk mengesahkan Pemilu Kada dan mengumumkannya.
- 13) Mengumumkan pasangan calon dan membuat beritanya.
- 14) Melaporkan hasil Pemilu Kada kepada KPU melalui KPU Provinsi Riau.
- 15) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
- 16) Menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kota Pekanbaru.
- 17) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota PPK, PPS, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota Pekanbaru yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Pekanbaru kepada masyarakat.

- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Riau.
- 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kada.
- 21) Menyampaikan hasil Pemilu Kada kepada DPRD Provinsi Riau, Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kota Pekanbaru.
- 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Riau dan/atau undang-undang.

B. Kewajiban KPUD Kota Pekanbaru

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dengan tepat waktu.
2. Memperlakukan peserta Pemilu Kada secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kada kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu. Kada kepada KPU Provinsi Riau.
6. Memelihara arsip dan dokumentasi Pemilu Kada serta mengelola barang inventaris KPU Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada kepada KPU dan KPU Provinsi Riau serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu.
8. Membuat berita acara pada setiap acara rapat pleno KPU Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pekanbaru.
9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Riau.

C. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 1) Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS & DPT
- 2) Membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
- 3) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di kecamatan.
- 4) Menerima & menyampaikan Daftar Pemilih ke KPU.
- 5) Mengumpulkan hasil penghitungan suara semua TPS di wilayah kerjanya
- 6) Melakukan rekapitulasi perhitungan suara dalam rapat dihadiri saksi.
- 7) Mengumumkan hasil rekapitulasi suara dan menyerahkan ke peserta Pemilu.
- 8) Membuat berita acara hasil verifikasi dan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kearnatan dan KPU.
- 10) Menindaklanjuti segera temuan dan laporan Panwaslu Kecamatan.

- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- 12) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- 13) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan KPU Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 14) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- 1) Membantu KPU Kota Pekanbaru (KPU) dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap (DPT).
- 2) Membentuk KPPS.
- 3) Membentuk dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
- 4) Mengumumkan DPS.
- 5) Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS.
- 6) Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS.
- 7) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang.
- 9) Menyampaikan DPT kepada KPU melalui PPK.

- 10) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kota Pekanbaru dan PPK.
- 11) Verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi;
- 12) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan KPU.
- 13) Melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon perseorangan
- 14) Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di kelurahan
- 15) Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS & tak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang disegel KPPS.
- 16) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
- 17) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di
- 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS dan masyarakat;
- 19) Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal perhitungan suara.
- 20) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU dan PPK sesuai dengan peraturan perundangan

21) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang.

Sebagai tambahan bahwa PPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dari PNS kecamatan, bertanggung jawab kepada Ketua PPK, dan dibantu 2 tenaga sekretariat (PNS). ITS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin seorang sekretaris dari PNS kelurahan, bertanggung jawab kepada ketua PPS, dan dibantu 2 tenaga sekretariat (PNS).

Dalam melaksanakan tugas, PPS atas nama KPU Kota Pekanbaru menetapkan dalam Surat Keputusan wajib dilaporkan ke KPU untuk pengangkatan dan pemberhentian: (1) PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang bertugas membantu PPS melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS dengan masa kerja satu bulan. PPDP berkedudukan di kantor PPS, dimana setiap TPS bertugas sebanyak 1 orang PPDP yang berasal dari pengurus RT/RW, yang diharapkan sebagai anggota KPPS. (2) KPPS (Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara) yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara, pada tanggal 18 Mei 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang direncanakan sebanyak 1.250 TPS dengan 581.852 pemilih.

E. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS).

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS sebelum hari pemungutan suara.
2. Menyerahkan DPT menurut TPS ke saksi peserta & PPL.
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan & laporan disampaikan saksi, PPL, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
7. Membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, PPL dan PPK melalui PPS.
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara ke PPS, PPL & KPU.
9. Menyerahkan kotak suara tersegel berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan pertauran perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang.

F. Pemilih

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 10 tahun 2008 bahwa pemilih adalah warga Negara, Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda, penduduk (KTP) atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih dan didaftarkan oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Selain itu, pemilih harus memenuhi syarat: (1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan (3) Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum. disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda, bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih. Seorang pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan disampaikan Pemerintah Daerah. Data pemilih ini dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

Data pemilih dari pemerintah daerah adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Pekanbaru (telah diterima tanggal 24 Nopember 2010) yang sekurang-kurangnya meliputi: 1. Nomor urut; 2. Nomor KTP; 3. Nama lengkap; 4. Tempat/tanggal lahir (umur); 5. Jenis kelamin; 6. Status perkawinan; 7. Alamat tempat tinggal; 8. Jenis cacat yang disandang.

Dapat ditambahkan bahwa benar tidaknya atau valid tidaknya DP4 sebagai awal data pemilih yang akan dimutakhirkan oleh KPU melalui PPS yang dibantu PPDP.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan data penelitian yang merupakan hasil yang penulis dapatkan di lokasi penelitian, yaitu kantor Camat Tampan dan KPUD Kota Pekanbaru, khususnya menjelaskan tingkat dan analisa partisipasi masyarakat dalam Pemilu kota Pekanbaru.

Data yang disajikan dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari hasil kuisioner yang diisi oleh masyarakat, kepala Lurah se-kecamatan Tampan dan pegawai di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, sebagai responden dan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan secara teoritis maupun penelitian secara langsung pada objek penelitian. Adapun analisa dalam pembahasan skripsi ini, penulis lakukan sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

5.1. Identitas Responden Secara Umum.

Identitas responden dalam penelitian ini secara umum dapat penulis bagi kedalam tiga bagian, yaitu identitas responden menurut usia, masa kerja, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Dalam penelitian ini responden berjumlah 100 orang, yaitu terdiri dari seluruh pegawai Kantor Camat Tampan, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Pedagang pasar di Kecamatan Tampan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1 : Usia Responden.

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 – 30 Tahun	33	33
2.	31 – 40 Tahun	28	28
3.	41 – 50 Tahun	25	25
4.	51 – 60 Tahun	14	14
Jumlah		100	100

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 33 orang (33%), yang berusia 31-40 tahun sebanyak 28 orang (28%), sedangkan yang berusia 41-50 tahun sebanyak 25 orang (25%), dan yang berusia 51-60 tahun sebanyak 14 orang (14%). Artinya dari keseluruhan usia tersebut semuanya berumur diatas 20 tahun, maka sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pemilukada untuk menentukan hati nuraninya.

Tabel V.2 : Masa kerja responden

No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1.	1 - 10 Tahun	59	59
2.	11 – 20 Tahun	30	30
3.	21 – 30 Tahun	11	11
Jumlah		100	100

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang mempunyai masa kerja 1-10 tahun sebanyak 59 orang (59%), sedangkan yang mempunyai masa kerja 11-20 tahun sebanyak 30 orang (30%), dan yang mempunyai masa kerja 21-30 tahun sebanyak 11 orang (11%). Maka dari masa kerja tersebut sangat menentukan kualitas dalam memilih pemimpin yang berpengalaman sesuai kondisi masyarakat dan pemerintahanya.

Tabel V.3 : Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pria	67	67
2.	Wanita	33	33
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang mempunyai jenis kelamin pria sebanyak 67 orang (67%), sedangkan jenis kelamin wanita sebanyak 33 orang (33%). Dari jenis kelamin juga berpengaruh terhadap hasil pemilukada menurut persepsi individu dalam menentukan kepemimpinan terhadap jenis kelamin.

Tabel V.4 : Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
2.	SMA	40	40
3.	D1, D2, D3	6	6
4.	S1	38	38
5	S2	16	16
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang berpendidikan SMA sebanyak 40 orang (40%), yang berpendidikan Diploma 6 orang (6%), yang berpendidikan S1 sebanyak 38 orang (38%) sedangkan yang berpendidikan S2 sebanyak 16 orang (16%). Maka dapat disimpulkan khususnya dalam penelitian ini secara umum tingkat pendidikan pada kantor camat tampan kota pekanbaru adalah masih banyak yang berpendidikan tamatan SMA yaitu sebanyak 40 orang (40%). Artinya dari tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap menentukan kualitas pemimpin yang baik dan bersih.

5.2. Analisis Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi yaitu ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar. Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik

dalam negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.

Pemahaman konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh dikemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering pula berpengaruh bagi lingkungannya.

Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi politik menurut Meriam Budiarjo bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida, ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu dibuktikan dirinya unggul dari pada orang lain. Maka dengan demikian perkataan lain struktur piramida kekuasaan terbentuk dalam sejarah masyarakat. Kemudian dapat juga didefinisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat sangat memerlukan motivasi sehingga mau berbuat sesuatu yang telah direncanakan baik secara sendiri maupun dengan orang lain. Seseorang mau ikut berpartisipasi dalam pemilukada kota Pekanbaru disebabkan adanya motivasi dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu menjadi panutan dalam kehidupan mereka dan merubah kehidupan menjadi lebih baik.

Berikut ini penulis akan menguraikan tanggapan responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat pemilukada kota Pekanbaru yang diwakili oleh 4 pertanyaan yang mencerminkan indikator partisipasi masyarakat.

Tabel V.5 :Tanggapan responden terhadap ikut serta dalam memberikan hak suara pada Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Tahun 2011.

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	12	12
2.	Setuju	28	28
3.	Cukup Setuju	25	25
4.	Tidak Setuju	35	35
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap ikut serta dalam memberikan hak suara pada Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Tahun 2011, dimana 12 orang (12%) responden menyatakan Sangat Setuju, 28 orang (28%) menyatakan setuju, 25 orang (25%) menyatakan cukup setuju, sedangkan 35 orang (35%) menyatakan tidak setuju.

Dari tabel diatas, penulis dapat menganalisis bahwa ikut serta dalam memberikan hak suara pada Pemilukada, tidak dapat sepenuhnya ditaati dengan baik, hal ini disebabkan oleh sikap yang tidak terbiasa berpartisipasi dan tidak

merasa tanggung jawab sehingga merasa tidak merasa wajib ikut serta, padahal dalam menentukan pemimpin, pengaruh masyarakat merupakan hal yang penting dalam kesejahteraan rakyat.

Tabel V.6 : Tanggapan responden terhadap menyumbangkan pemikiran yang terbaik dalam pembentukan panitia Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Kecamatan Tahun 2011.

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	-	
2.	Setuju	27	27
3.	Cukup Setuju	48	48
4.	Tidak Setuju	25	25
5.	Sangat tidak Setuju		
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap menyumbangkan pemikiran yang terbaik dalam pembentukan panitia Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Kecamatan Tahun 2011, dimana ada 27 orang (27%) yang menyatakan Setuju, 28 orang (28%) menyatakan Cukup Setuju, dan 25 orang (25%) menyatakan Tidak Setuju.

Dari tabel diatas, penulis dapat menganalisis bahwa terhadap menyumbangkan pemikiran yang terbaik dalam pembentukan panitia Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Kecamatan Tahun 2011, tidak sepenuhnya terlaksana dengan perencanaan. Ini terbukti pada jawaban responden, sebagian besar yang menyatakan hanya cukup setuju dan juga menyatakan tidak setuju, hal ini disebabkan oleh sikap masyarakat dalam menentukan hak suara tidak memikirkan suatu akibat kedepan, sehingga berpengaruh dalam kondisi kepemimpinan dan tugas serta tanggung jawab dan amanah yang diterima.

Tabel V.7 : Tanggapan responden terhadap memberikan hak pilih apabila mendapat imbalan yang sesuai dengan keinginan.

No	Alternatif jawaban	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	7	7
2.	Setuju	30	30
3.	Cukup Setuju	33	33
4.	Tidak Setuju	30	30
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden memberikan hak pilih apabila mendapat imbalan yang sesuai dengan keinginan, dimana 7 orang (7%) menyatakan Sangat Setuju, 30 orang (30%) menyatakan Setuju, 33 orang (33%) menyatakan Cukup Setuju, dan 30 orang (30%) menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan jawaban di atas, dengan memberikan hak pilih apabila mendapat imbalan yang sesuai dengan keinginan, sudah bisa dikatakan baik, karena ada 30% yang menyatakan setuju, 7% yang menyatakan sangat setuju dan 33% yang menyatakan cukup setuju, hanya saja tergantung pada masyarakat, apakah para masyarakat dengan berbagai macam karakter setiap yang akan terlibat sogokan dari setiap calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru tanpa secara sehat. Maka pelaksanaanya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan menjadi suatu kewajiban yang harus diselesaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.8.

Tabel V.8 : Tanggapan responden terhadap memberikan hak pilih sesuai hati nurani dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Tahun 2011

No	Alternatif jawaban	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	10	10
2.	Setuju	46	46
3.	Cukup Setuju	38	38
4.	Tidak Setuju	6	6
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap memberikan hak pilih sesuai hati nurani dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Tahun 2011, Dimana 10 orang (10%) menyatakan Sangat Setuju, 46 orang (46%) menyatakan Setuju, 38 orang (38%) menyatakan Cukup Setuju, dan 6 orang (6%) menyatakan tidak setuju. Maka dapat disimpulkan secara umum Tanggapan responden terhadap memberikan hak pilih sesuai hati nurani dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Tahun 2011 adalah setuju.

Tabel V.9 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat Pemilukada Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Tahun 2011.

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	12 (12%)	28 (28%)	25 (25%)	35 (35%)	-	100 (100 %)
2	-	27 (27%)	48 (48%)	25 (25%)	-	100 (100 %)
3	7 (7%)	30 (30%)	33 (33%)	30 (30%)	-	100 (100 %)
4	10 (10%)	46 (46%)	38 (38%)	6 (6%)	-	100 (100 %)
Rata-rata	7 (7%)	33 (33%)	36 (36%)	24 (24%)	0 (00,00%)	100 (100 %)

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Dimana 7 orang (7%) menyatakan sangat baik, 33 orang (33%) menyatakan baik, 36 orang (36%) menyatakan cukup baik, dan 24 orang (24%) menyatakan tidak baik. Maka dapat disimpulkan rata-rata tanggapan responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah cukup baik.

Dari jawaban responden, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilukada kota Pekanbaru 2011 seluruh TPS dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat dikatakan baik, ini terbukti dari jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju dari pelaksanaan pemilukada kota Pekanbaru 2011, kemudian ada juga sebagian responden yang menyatakan hanya cukup setuju dan tidak setuju, ini berarti masyarakat belum semuanya merasa berpartisipasi terhadap hak suara yang diberikan. Sehingga ada juga masyarakat yang menolak untuk memilih dan tidak mau datang pada waktu yang telah ditetapkan.

5.3. Analisis Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk melakukan aktivitas termasuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pemilukada kota Pekanbaru, maka demi terwujudnya demokrasi yang bersih tentunya partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Namun disamping dalam memenuhi kebutuhan hidup juga penting, sehingga untuk berpartisipasi dalam pemilukada kota Pekanbaru juga berpengaruh, karena sebagian masyarakat menganggap hanya buang-buang waktu saja. Padahal pemimpin merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesejahteraan rakyat.

Kemudian peran seorang pemimpin dituntut untuk bisa melayani masyarakat seutuhnya bukan hanya sekedar janji politik ketika mau mencalonkan, maka daripada itu partisipasi masyarakat merupakan sangat penting untuk ditingkatkan. Sehingga masyarakat berperan aktif dalam proses pelaksanaan pemilukada kota Pekanbaru yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Maka dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel V.10 :Tanggapan responden terhadap mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.

No	Alternatif jawaban	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sangat baik	15	15
2.	Baik	41	41
3.	Cukup baik	34	34
4.	Tidak baik	10	10
5.	Sangat tidak baik	-	-
Jumlah		100	100

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Dimana 15 orang (15%) menyatakan Sangat baik, 41 orang (41%) menyatakan baik, 34 orang (34%) menyatakan cukup baik dan 10 orang (10%) menyatakan tidak baik. Maka dapatlah disimpulkan tanggapan responden terhadap mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah baik.

Dari jawaban responden, penulis menyimpulkan bahwa mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru sudah baik, karena sebagian responden menyatakan baik, ini bearti

tingkat kinerja panitia dari KPUD Pekanbaru dan instansi terkait sudah berjalan dengan harapan dan sebagian lagi yang menyatakan cukup baik dan tidak baik, disnipun dapat penulis menganalisis bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal dilakukan, karena pemerintah provinsi hanya sebagian saja dalam melakukan pengawasan terhadap panitia pelaksana pemilukada, ini bisa menyebabkan perbedaan tingkat partisipasi suatu jalanya proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Maka sangatlah penting kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilukada kota pekanbaru tersebut. Kemudian setiap masyarakat juga dituntut untuk berbagi informasi.

Tabel V.11 : Tanggapan responden terhadap mengajak sesama masyarakat ikut mendaftar dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	-	-
2.	Baik	44	44
3.	Cukup baik	36	36
4.	Tidak baik	20	20
5.	Sangat tidak baik	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap mengajak sesama masyarakat ikut mendaftar dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 44 orang (44%) menyatakan baik, 36 orang (36%) menyatakan cukup baik dan 20 orang (20%) menyatakan tidak baik. Maka secara umum dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap mengajak sesama masyarakat ikut mendaftar dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah baik.

Dari jawaban responden, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat kota Pekanbaru masih dikatakan memiliki hubungan baik dalam bersama-sama untuk memilih pemimpin yang adil, sehingga hubungan interaksi terbangun.

Tabel V.12 : Tanggapan responden terhadap sikap tidak peduli terhadap informasi tentang pendaftaran pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	28	28
2.	Baik	56	56
3.	Cukup baik	16	16
4.	Tidak baik	-	-
5.	Sangat tidak baik	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap sikap tidak peduli terhadap informasi tentang pendaftaran pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 28 (28%) orang menyatakan sangat baik, 56 orang (56%) menyatakan baik dan 16 orang (16%) menyatakan cukup baik.

Maka secara umum dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap terhadap sikap tidak peduli terhadap informasi tentang pendaftaran pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah baik. Ini bearti masyarakat juga kurang menanggapi dan peduli terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilukada kota pekanbaru, sehingga dari data yang diperoleh masih banyak masyarakat yang tidak tahu prosedur pemilihan yang tepat dan benar.

Tabel V.13 : Tanggapan responden terhadap sikap masa bodoh meskipun tidak mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	29	29
2.	Baik	41	41
3.	Cukup baik	25	25
4.	Tidak baik	5	5
5.	Sangat tidak baik	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap sikap masa bodoh meskipun tidak mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana orang 29 (29%) menyatakan sangat baik, 41 orang (41%) menyatakan baik, 25 orang (25%) menyatakan cukup baik dan 5 orang (5%) menyatakan tidak baik.

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa terhadap sikap masa bodoh meskipun tidak mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Wali Kota Pekanbaru dengan hasil angket dinyatakan 5% yang masih menyatakan tidak baik. Ini tentunya masyarakat tidak semua berpikir untuk maju dalam menentukan pemimpin masa depan, sehingga akibatnya berdampak terhadap masyarakat itu sendiri.

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap faktor ekonomi

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	15 (16,30%)	41 (41%)	34 (34%)	10 (10%)	-	100 (100 %)
2	-	44 (44%)	36 (36%)	20 (20%)	-	100 (100 %)
3	28 (21,73%)	56 (56%)	16 (16%)	-	-	100 (100 %)
4	29 (22,82%)	41 (41%)	25 (25%)	5 (5%)	-	100 (100 %)
Rata-rata	18 (18%)	45 (46%)	28 (28%)	9 (9%)	0 (00,00%)	100 (100 %)

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap faktor ekonomi dengan sikap masa bodoh meskipun tidak mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 18 orang (18%) menyatakan sangat baik, 46 orang (46%) menyatakan cukup baik, 28 orang (28%) menyatakan baik dan 9 orang (9%) yang menyatakan tidak baik. Maka dapat disimpulkan rata-rata tanggapan responden terhadap faktor ekonomi adalah cukup baik.

Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dengan indikator ekonomi adalah baik, tapi sebagian lagi responden yang menyatakan tingkat pengawasan pimpinan tidak baik yaitu sebanyak 9%. Maka dapat penulis analisis dari pernyataan tersebut tingkat partisipasi yang dipengaruhi faktor ekonomi Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat

diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu di kecamatan Tampan, juga terjadi hal tersebut.

5.4. Analisis Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan factor utama dalam menilai pemimpin yang berkualitas, karena semakin tinggi mutu pendidikan masyarakat maka semakin bagus pula dalam menentukan pilihan masyarakat itu terhadap pemimpinnya. Artinya dengan pemimpin yang berkualitas tentu mampu untuk memecahkan permasalahan yang kongkrit dengan cepat sesuai tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan cerdas, tetapi juga dituntut dengan azaz keadilan terhadap rakyat. Maka daripada itu partisipasi masyarakat merupakan factor utama dalam menentukan sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi suatu lingkungan.

Tabel V.15 : Tanggapan responden terhadap hanya mementingkan diri sendiri dalam pendaftaran Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat penting	20	20
2.	Penting	41	41
3.	Cukup penting	39	39
4.	Tidak penting	-	-
5.	Sangat tidak penting	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap hanya mementingkan diri sendiri dalam pendaftaran Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. 20 orang (20%) menyatakan sangat penting, 41 orang (41%) menyatakan penting dan 39 orang (39%) menyatakan cukup penting. Maka

dapat disimpulkan tanggapan responden hanya mementingkan diri sendiri dalam pendaftaran Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah penting.

Dari jawaban responden, penulis menganalisis bahwa terhadap hanya mementingkan diri sendiri dalam pendaftaran Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru sudah cukup penting, karena sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa dalam pendaftaran Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah penting, tapi sebagian lagi responden menjawab biasa saja atau sekedar cukup penting artinya masyarakat masih ragu-ragu dan merasa takut terhadap salah pilih dan bisa berakibat kesejahteraan rakyat kedepan. kemudian dapat diperjelas melalui tabel V.6 :

Tabel V.16 : Tanggapan responden terhadap kehadiran dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	35	35
2.	Setuju	51	51
3.	Cukup Setuju	14	14
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap kehadiran dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 35 orang (35%) menyatakan sangat setuju, 51 orang (51%) menyatakan setuju, dan 14 orang (14%) orang menyatakan cukup setuju. Maka secara umum dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap kehadiran

dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah setuju.

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa terhadap kehadiran dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yaitu masyarakat dalam kampanye masih berpartisipasi. Namun pada realitanya masyarakat masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, dengan alasan kurangnya kepercayaan terhadap pemimpin yang memberikan janji tanpa bukti.

Tabel V.17 : Tanggapan responden terhadap kesediaan meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	5	5
2.	Setuju	23	23
3.	Cukup Setuju	56	56
4.	Tidak Setuju	16	16
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden kesediaan meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Dimana 5 orang (5%) menyatakan sangat setuju, 23 orang (23%) menyatakan setuju, 56 orang (56%) menyatakan cukup setuju dan 16 orang (16%) menyatakan tidak setuju.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden kesediaan meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru adalah cukup setuju.

Tabel V.18 : Tanggapan responden senantiasa mencari informasi yang berkaitan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat tepat	-	-
2.	Tepat	36	36
3.	Cukup Tepat	36	36
4.	Tidak Tepat	28	28
5.	Sangat tidak Tepat	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012.*

Dari data diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap senantiasa mencari informasi yang berkaitan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 36 orang (36%) menyatakan tepat, 36 orang (36%) menyatakan cukup tepat, dan 28 orang (28%) menyatakan tidak tepat.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden senantiasa mencari informasi yang berkaitan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah cukup tepat karena masyarakat.

Tabel V.19 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap faktor pendidikan.

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	20 (20%)	41 (41%)	39 (39%)	-	-	100 (100 %)
2	35 (35%)	51 (51%)	14 (14%)	-	-	100 (100 %)
3	5 (5%)	23 (23%)	56 (56%)	16 (16%)	-	100 (100 %)
4	36 (36%)	36 (36%)	28 (28%)	-	-	100 (100 %)
Rata-rata	24 (24%)	38 (38%)	34 (34%)	4 (4%)	0 (00,00%)	100 (100 %)

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap faktor pendidikan. Dimana 24 orang (24%) menyatakan sangat baik, 38 orang (38%) menyatakan baik, 34 orang (34%) meyatakan cukup baik, dan 4 orang (4%) menyatakan tidak baik. Maka dapat disimpulkan rata-rata tanggapan responden terhadap faktor pendidikan adalah cukup baik.

5.5. Analisis Sosial

Masalah sosial merupakan kondisi kehidupan ditengah-tengah masyarakat yang semakin komplek dengan tekanan sistem politik pada suatu daerah, khususnya di kota pekanbaru karena sarana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih sepasang pemimpin guna membentuk pemerintahan didaerah untuk satu periode kepemimpinan pemerintahan lima tahun berikutnya. Segala bentuk tantangan permasalahan yang berada didaerah tersebut merupakan tanggungan jawab pemimpin terpilih pada saat pesta demokrasi tersebut telah usai. Dalam Pemilukada rakyat pemilih di daerah diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan keinginannya dalam rangka mendapatkan kemajuan dan perbaikan hidup baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, agama, keamanan, kenyamanan dll sebagainya, namun adakalanya sebagian masyarakat tidak peduli dengan permasalahan tersebut.

Tabel V.20 :Tanggapan responden terhadap tidak peduli terhadap pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sangat pernah	15	15
2.	Pernah	41	41
3.	Cukup pernah	-	-
4.	Tidak pernah	44	44
5.	Sangat tidak pernah	-	-
Jumlah		100	100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 15 orang (15%) menyatakan sangat pernah, 41 orang (41%) menyatakan pernah dan 44 orang (44%) menyatakan tidak pernah.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan pelaksanaan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah tidak pernah.

Tabel V.21 : Tanggapan responden terhadap merasa jenuh untuk mendengarkan berbagai hal yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	10	10
2.	Setuju	39	39
3.	Cukup Setuju	51	51
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap merasa jenuh untuk mendengarkan berbagai hal yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 10 orang (10%) menyatakan setuju, 39 orang (39%) menyatakan setuju, dan 51 orang (51%) orang menyatakan cukup setuju.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan merasa jenuh untuk mendengarkan berbagai hal yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan cukup setuju.

Tabel V.22 : Tanggapan responden terhadap merasa tidak perlu mencari informasi yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat penting	5	5
2.	Penting	49	49
3.	Cukup penting	41	41
4.	Tidak penting	5	5
5.	Sangat tidak penting	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012.*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap merasa tidak perlu mencari informasi yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 5 orang (5%) menyatakan sangat penting, 49 orang (49%) menyatakan penting, 41 orang (41%) menyatakan cukup penting dan 5 orang (5%) menyatakan tidak penting.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan merasa tidak perlu mencari informasi yang berkaitan dengan kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan menyatakan penting. Artinya masyarakat masih butuh informasi yang berkaitan dengan pemilukada.

Tabel V.23 : Tanggapan responden terhadap kehadiran dan turut serta untuk memberikan hak suara dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat puas	-	-
2.	Puas	36	36
3.	Cukup puas	23	23
4.	Tidak puas	41	41
5.	Sangat tidak puas	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2011*

Dari data diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap kehadiran dan turut serta untuk memberikan hak suara dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 36 orang (36%) menyatakan puas, 23 orang (23%) menyatakan cukup puas, dan 41 orang (41%) menyatakan tidak puas.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan kehadiran dan turut serta untuk memberikan hak suara dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan menyatakan tidak puas. Artinya masyarakat tidak mau tau padahal hak suaranya menentukan pemimpin masa depan yang amanah terhadap rakyat.

Tabel V.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap faktor sosial

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	15 (15%)	41 (41%)	-	44 (44%)	-	100 (100 %)
2	10 (10%)	39 (39%)	51 (51%)	-	-	100 (100 %)
3	5 (5%)	49 (49%)	41 (41%)	5 (5%)	-	100 (100 %)
4	-	36 (36%)	23 (23%)	41 (41%)	-	100 (100 %)
Rata-rata	8 (8%)	41 (41%)	29 (29%)	22 (22%)	0 (00,00%)	100 (100 %)

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap faktor sosial. Dimana 8 orang (8%) menyatakan sangat baik, 41 orang (41%) menyatakan baik, 29 orang (29%) meyatakan cukup baik, dan 22 orang (22%) menyatakan tidak baik. Maka dapat disimpulkan rata-rata tanggapan responden terhadap faktor sosial adalah cukup baik.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan faktor sosial dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan menyatakan tidak puas. Artinya masyarakat sudah kecewa terhadap janji-janji politik yang diberikan sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat tersebut.

5.6. Analisis Kepribadian Individu Dalam Masyarakat

Kepribadian individu dalam masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan suatu pilihan menurut hati nurani agar pemimpin itu bisa menjadi suatu harapan masa dapan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka sosok seorang pemimpin yang idaman masyarakat adalah pemimpin yang betul-betul amanah terhadap janji dan merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Sehingga kelompok masyarakat dengan memiliki budaya dan karakter yang berbeda juga berpengaruh terhadap proses sosialisasi di lingkungan pada kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang dilakukan oleh para petugas sensus dalam menentukan daftar pemilih tetap.

Tabel V.25 : Tanggapan Responden Tentang bersikap tidak mau tau terhadap janji-janji politik pada kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	12	12
2.	Baik	28	28
3.	Cukup baik	25	25
4.	Tidak baik	35	35
5.	Sangat tidak baik	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang bersikap tidak mau tau terhadap janji-janji politik pada kampanye Pemilukada

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang memberikan jawaban sangat baik, 12 orang (12%) , 28 orang (28%) menyatakan baik, 25 orang (25%) menyatakan cukup baik sedangkan 35 orang (35%) yang menyatakan tidak baik.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan bersikap tidak mau tau terhadap janji-janji politik pada kampanye Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan responden yang menyatakan tidak baik. Artinya masyarakat sudah kecewa terhadap janji-janji politik yang diberikan dan merasa sudah dibohongi sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan keinginan untuk memilih pemimpin yang akan dipilih.

Tabel V.26 : Tanggapan Responden senantiasa mencari informasi tentang kapan diselenggarakannya Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	-	-
2.	Setuju	27	27
3.	Cukup Setuju	48	48
4.	Tidak Setuju	25	25
5.	Sangat tidak Setuju		
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden yang senantiasa mencari informasi tentang kapan diselenggarakannya Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 27 orang (27%) menyatakan setuju, 48 orang (48) menyatakan cukup setuju dan 25 orang (25%) menyatakan tidak setuju.

Kemudian dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan senantiasa mencari informasi tentang kapan diselenggarakannya

Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan menyatakan cukup setuju. Artinya masyarakat sudah bisa berpartisipasi terhadap sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat agar pemilukada dapat berjalan dengan baik.

Tabel V.27 : Tanggapan Responden Terhadap cendrung absten dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	7	7
2.	Setuju	30	30
3.	Cukup Setuju	33	33
4.	Tidak Setuju	30	30
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap cendrung absten dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 7 orang (7%) menyatakan sangat setuju, 30 orang (30%) menyatakan setuju, 33 orang (33%) menyatakan cukup setuju dan 30 orang (30%) menyatakan tidak setuju.

Dari penjelasan tabel diatas dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan senantiasa cendrung absten dalam pelaksanaan Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan menyatakan cukup setuju. Artinya masyarakat sudah mengerti dengan sosialisasi yang telah diberikan. Sehingga pada realisasinya pada pelaksanaan pemilukada tersebut tidak terjadi absten.

Tabel V.28 : Tanggapan Responden Tentang berperan aktif dalam proses penghitungan suara hasil Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	10	10
2.	Setuju	46	46
3.	Cukup Setuju	38	38
4.	Tidak Setuju	6	6
5.	Sangat tidak Setuju	-	-
Jumlah		100	100,00

Sumber : *Data Olahan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap berperan aktif dalam proses penghitungan suara hasil Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dimana 10 orang (10%) menyatakan sangat setuju, 46 orang (46%) menyatakan setuju, 38 orang (38%) menyatakan cukup setuju dan 6 orang (6%) menyatakan tidak setuju.

Dari penjelasan tabel diatas dapat penulis analisis bahwa tanggapan responden diatas dengan berperan aktif dalam proses penghitungan suara hasil Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru adalah jumlah terbanyak tanggapan menyatakan setuju. Artinya masyarakat berhak mengontrol terhadap penghitungan suara yang telah dipilih, agar tidak terjadi kecurangan dari salah satu team sukses calon masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan penghitungan harus dijaga secara maksimal. Maka daripada itu disamping pengawasan dari pemerintah tentu juga dari masyarakat harus ikut berperan aktif. Karena dalam penghitungan suara tersebut terdiri dari beberapa kelompok team sukses dan saksi-saksi dari setiap calon yang diberi tugas masing-masing.

Tabel V.29 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Kepribadian Individu Dalam Masyarakat

No	Kategori					Jumlah
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
1	12 (12%)	28 (28%)	25 (25%)	35 (35%)	-	100 (100 %)
2	-	27 (27%)	48 (48%)	25 (25%)	-	100 (100 %)
3	7 (7%)	30 (30%)	33 (33%)	30 (30%)	-	100 (100 %)
4	10 (10%)	46 (46%)	38 (38%)	6 (6%)	-	100 (100 %)
Rata-rata	7 (7%)	33 (33%)	36 (36%)	24 (24%)	0 (00,00%)	100 (100 %)

Sumber : *Data Olahan Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap kepribadian individu dalam masyarakat. Dimana 7 orang (7%) menyatakan sangat baik, 33 orang (33%) menyatakan baik, 36 orang (36%) menyatakan cukup baik, dan 24 orang (24%) menyatakan tidak baik. Maka dapat disimpulkan rata-rata tanggapan responden terhadap kepribadian individu dalam masyarakat adalah cukup baik.

Maka secara umum dapat disimpulkan tanggapan responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat, penulis menganalisis bahwa terhadap kepribadian individu dalam masyarakat yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

a. Strengths (Kekuatan)

Masyarakat sesegera mungkin memahami dan mengetahui perubahan-perubahan dari pihak pelaksana proses pemilukada secara langsung sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami proses pelaksanaan pemilukada.

b. Weakness (Kekurangan)

- a) Tingkat kejenuhan masyarakat tinggi karena seringnya sosialisasi
- b) Sulitnya pengumpulan masyarakat disuatu lokasi tertentu dalam rangka sosialisasi proses pemilukada
- c) Hal yang disosialisasikan seringkali dianggap angin lalu dari penerima materi sosialisasi.

c. Opportunity (Peluang)

Mengurangi kesalahan penafsiran aturan dan kegagalan pada saat proses pemilihan umum kepala daerah.

d. Problem (Masalah)

Seringkali sosialisasi yang disampaikan tidak sesuai dengan realisasi dilapangan baik dari segi program, waktu maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan sosialisasi pada saat itu sehingga masyarakat menganggap bahwa hal ini hanyalah hal yang tidak penting dan sangat tidak berguna untuk dilaksanakan.

e. Action (Aksi)

Perlu memberikan pemahaman akan pentingnya sosialisasi itu sendiri sehingga dapat mengurangi kesalahan penafsiran dan anggapan bahwa dengan hal tersebut hanya membuat waktu terbuang sia-sia.

Dari tabel keseluruhan hasil kuisisioner yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum tercipta dan terlaksana sesuai dengan jawaban responden secara umum 40% kebawah, maka tergolong tidak baik ini disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan kepribadian individu dalam masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari responden mengenai pendapat mereka tentang tingkat partisipasi masyarakat yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan keberibadian individu dalam masyarakat maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, dapat dilihat berdasarkan data yang penulis peroleh pada hasil penelitian, tentang banyaknya responden yang menyatakan bahwa :

1. Partisipasi masyarakat kecamatan Tampan kota Pekanbaru dikategorikan rendah yaitu berdasarkan hasil analisis dari setiap tabel.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru oleh beberapa faktor antara lain: faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan keberibadian individu dalam masyarakat. Maka untuk lebih jelas dapat penulis uraikan pada tabel rekapitulasi dari seluruh indikator dari tanggapan responden melalui hasil angket dan interview sebagai berikut Dimana 14 orang (14%) menyatakan sangat baik, 39 orang (39%) menyatakan baik, 33 orang (33%) menyatakan cukup baik, dan 14 orang (14%) menyatakan tidak baik. Maka dapat disimpulkan rata-rata tanggapan responden

terhadap kepribadian individu dalam masyarakat adalah cukup baik. Sehingga dari rekapitulasi tabel diatas maka tanggapan responden masih ada yang menyatakan tidak baik sebanyak 14% yang menjadi indikator masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

6.2. Saran.

Disarankan kepada masyarakat agar dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilukada dan menghilangkan anggapan mereka yang salah, yang beranggapan tidak ada untung dan ruginya berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, karena dengan berpartisipasi dalam pemilukada tersebut masyarakat dapat memilih calon wali kota dan wakil wali kota pekanbaru yang pantas dianggap mampu dan layak untuk menjadi seorang pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Ghofur, *Demokrasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, PT. Bumi Wali Songo 2002
- Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik*, PT Balai Pustaka, Jakarta 2003
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Mohtar Mas'oeed dan collin Macadrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Meriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, 1998
- _____, *Pusat-Pusat Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Merphin panjaitan, *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*, Jakarta, 2000
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineke Cipta, Jakarta, 1990
- Siangarimbun, Masri. (2006), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3S
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2005

Non Buku

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu

UU No. 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta :
Fokus media 2005

Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru

Surat Keputusan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2002 Tanggal 1 Juli 2002 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat